

## PENGARUH KOMPETENSI, PENGENDALIAN INTERN DAN TEKNOLOGI INFOMASI TERHADAP INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

Riska Riski Amalia  
*riskariskiamalia@gmail.com*  
Endang Dwi Retnani

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA) SURABAYA

### ABSTRACT

*This study aims to examine the effect of human resource competence, government internal control systems and the use of information technology on the quality of local government financial reports. The population in this study was the Regional Apparatus Organization (OPD) in the city of Surabaya. The sampling technique used in this study was purposive sampling and the samples used in this study were 22 agencies and 4 agencies in OPD in the city of Surabaya. The analysis model used is linear regression analysis. Based on the test results, it can be concluded: (1) the competence of human resources has a positive effect on the quality of financial reports, this shows that competent human resources on understanding a good accounting system can produce quality financial reports. (2) the government's internal control system has a positive effect on the quality of financial reports, this shows that if the internal control is in accordance with the regulations, it can provide adequate confidence regarding the achievement of local government objectives. (3) the use of information technology has a positive effect on the quality of financial reports, this shows that the human resources (OPD) who handle the Regional Financial Information System are obliged to develop and take advantage of advances in information technology to improve the ability to manage local government finances, and distribute regional financial information. to the service.*

*Keywords: human resources, internal control effectiveness, information technology, quality of financial statements*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), sistem pengendalian intern pemerintah (SPI) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (KLK). Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Surabaya, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 22 Dinas dan 4 Badan di OPD di Kota Surabaya. Model analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan: (1) Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang berkompeten tentang pemahaman sistem akuntansi yang baik maka dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. (2) Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini menunjukkan jika pengendalian intern yang sesuai dengan peraturan maka dapat memberikan suatu keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah. (3) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia (OPD) yang menangani Sistem Informasi Keuangan Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan pemerintah daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada layanan publik.

Kata Kunci: SDM, SPI, PTI, KLK

### PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat yang semakin meningkat dalam pelaksanaan pemerintahan khususnya dalam perkembangan perekonomian negara menuntut pemerintah untuk

memberikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami sesuai dengan yang disebutkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah PP No. 71 Tahun 2010. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah. PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam kegiatannya organisasi sektor publik khususnya dalam praktek pelaporan keuangan merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Laporan keuangan pemerintah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah sebagai pihak *agent* dalam mengoptimalkan kinerja keuangan pemerintah kepada publik. Pemerintah dituntut untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik dan berkualitas sehingga dapat memberikan informasi yang andal dan akurat sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai *principal*. Salah satu strategi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik membagi pekerjaan kedalam satuan kerja termasuk didalamnya adalah satuan kerja ditingkat daerah yang disebut Organisasi Perangkat Daerah.

Seiring berlakunya Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah istilah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah berubah menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan perangkat pemerintah yang dimulai dari provinsi sampai dengan tingkat kabupaten. Didalam OPD terdapat dinas-dinas, lembaga, badan-badan inspektorat yang bertanggung jawab secara langsung kepada kepala daerah, kecamatan, kelurahan atau desa dan satuan yang setingkat lainnya. Bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah disebutkan Gubernur atau Bupati atau Walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang diatur dalam UU No 23 Tahun 2003.

Fenomena yang terjadi adalah masih terdapat permasalahan pada masing-masing instansi terkait dengan penggunaan anggaran diantaranya perencanaan yang kurang efektif, realisasi anggaran yang belum maksimal, kurangnya transparansi yang mengakibatkan dokumen anggaran masih susah diakses, kurangnya keterlibatan publik dan juga rawan terjadi korupsi ([www.googleweblight.com](http://www.googleweblight.com)). Untuk menilai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dibutuhkan suatu badan atau pihak eksternal yang bertugas untuk menilai apakah laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan SAP dan tentunya memberikan informasi yang andal dan akurat, maka setiap tahunnya LKPD mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawasan Keuangan (BPK). Terdapat empat opini yang dapat diberikan oleh BPK diantaranya: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (OTW), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). Dari empat opini yang diberikan BPK, LKPD diharapkan mendapat penilaian WTP yang artinya laporan keuangan tersebut disajikan dengan wajar dan berkualitas.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi. Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan kemampuan individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk menjalankan tugas dan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Ihsanti, 2014). Berhasil tidaknya suatu entitas bukan semata-mata hanya dipengaruhi oleh keterlibatan SDM, tetapi yang terpenting adalah kompetensi SDM yang dimiliki. Kompetensi SDM sangat berpengaruh untuk keberhasilan entitas tersebut. Masalah kompetensi sumber daya manusia menjadi tantangan setiap pegawai pemerintah daerah.

Adapun fenomena yang masih sering dijumpai dalam kesenjangan antara kompetensi sebagai syarat tugas pokok dengan kompetensi yang dimiliki para pegawai, dimana permasalahan yang terjadi pada staf pengelola keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan masih kurang memiliki keterampilan dalam bidang akuntansi. Pujanira (2017), dalam penelitiannya mengemukakan bahwa dengan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang sesuai dengan pemahaman sistem akuntansi yang baik maka akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan ketepatan waktu dalam pembuatannya. Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan suatu sistem pengendalian intern yang akan diselenggarakan secara menyeluruh pada lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP Nomor 60 Tahun 2008). SPIP yang merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya manusia pada suatu organisasi yang turut berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan secara dini. SPIP diharapkan dapat membantu entitas untuk dapat berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif adalah agar laporan keuangan dapat diandalkan (Yosefrinaldi, 2013).

Sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang nantinya dapat diterapkan untuk mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan laporan keuangan yang handal serta menjamin dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nugroho (2018), dalam penelitiannya mengemukakan bahwa pengendalian intern yang diberlakukan sesuai dengan peraturan maka dapat memberikan suatu keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang dapat digambarkan dengan kualitas laporan keuangan yang baik. Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi yang merupakan penggunaan teknologi informasi yang mempunyai peranan dalam mencapai laporan keuangan yang berkualitas (Yosefrinaldi, 2013). Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer yang digunakan untuk proses dan penyimpanan informasi, juga dapat berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk menyebarkan informasi. Penggunaan teknologi informasi oleh entitas dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pengendalian internal dengan cara konsisten dalam memproses sejumlah besar volume transaksi data.

Teknologi informasi juga diharapkan dapat meningkatkan ketepatan waktu dan akurasi dari informasi. Peningkatan kedalaman pengendalian internal yang dihasilkan sebagai pengintegrasian teknologi informasi kedalam sistem akuntansi. Setyowati *et al.*, (2016), dalam penelitiannya mengemukakan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan pemerintah daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada layanan publik. Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian sebelumnya dapat kita lihat bahwa masih banyak kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, kesesuaian laporan keuangan yang dihasilkan dengan peran penting kompetensi sumber daya manusia yang terdapat didalamnya, sistem pengendalian intern pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi yang semakin canggih. Penelitian ini akan dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Surabaya yang merupakan salah satu kabupaten/kota di Jawa Timur yang meraih predikat WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2017 dan untuk mempertahankan predikat tersebut pada periode atau tahun selanjutnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang dapat diajukan adalah: (1) Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah? (2) Apakah sistem pengendalian intern

pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah? (3) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

Sedangkan tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk: (1) Menguji secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah; (2) Menguji secara empiris pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; (3) Menguji secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## TINJAUAN TEORETIS

### Teori Keagenan Sektor Publik

Teori keagenan juga dapat menjelaskan hubungan para pihak dalam sektor pemerintahan, legislatif sebagai prinsipal dan eksekutif sebagai agen. Hubungan ini dapat menyebabkan perilaku oportunistik bagi eksekutif mengingat eksekutif sebagai perancang anggaran sekaligus sebagai pelaksana anggaran. Menurut Carr dan Brower (2000), model keagenan yang sederhana mengasumsikan dua pilihan dalam kontrak: (1) *behavior-based*, yakni prinsipal harus memonitor perilaku agen dan (2) *outcome-based*, yakni adanya insentif untuk memotivasi agen dalam mencapai kepentingan prinsipal. Oportunisme bermakna bahwa ketika terjalin kerjasama antara prinsipal dan agen, kerugian prinsipal karena agen mengutamakan kepentingannya (*agent self-interest*) kemungkinan besar akan terjadi. Praktik agen yang mengutamakan kepentingannya akan berdampak pada pengelolaan keuangan dan laporan keuangan yang menyimpang dari peraturan perundangan-undangan maupun standar akuntansi yang berlaku, sehingga hasil pemeriksaan laporan keuangan akan mendapat opini selain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Mengacu pada teori agensi (*agency theory*), akuntabilitas publik dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Faristina, 2011).

Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah adalah seperti hubungan antara prinsipal dengan agen. Masyarakat adalah *principal* dan pemerintah adalah *agent*. Prinsipal memberikan wewenang pengaturan kepada agen, dan memberikan sumberdaya kepada agen (dalam bentuk pajak dan lain-lain). Sebagai wujud pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan, agen memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap prinsipal (Santoso dan Pambelum, 2008). Teori keagenan sering digunakan untuk menjelaskan kecurangan akuntansi. Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (*agency relationship*). Dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang ditentukan oleh para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipal, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Hubungan keagenan dalam pemerintah sebagai agen harus melaksanakan apa yang menjadi kepentingan para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipalnya (Faristina, 2011). Teori keagenan juga dapat menjelaskan hubungan para pihak dalam sektor pemerintahan, legislatif sebagai

prinsipal dan eksekutif sebagai agen, hubungan eksekutif dengan legislatif dengan nama *self-interest model*. Legislators ingin dipilih kembali, birokrat ingin memaksimumkan anggarannya, dan konstituen ingin memaksimumkan utilitasnya.

### **Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah dan DPRD (UU No. 32 Tahun 2004). PP no 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dalam UUD 1945. Undang-undang mengatur tentang hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dengan memperhatikan karakter dan keragaman daerah. Pemerintah daerah telah diberikan hak untuk memperoleh sumber keuangan yaitu berupa kesesuaian antara penyediaan pendanaan dan urusan yang diserahkan pemerintah, hak untuk memungut, mendayagunakan pajak dan retribusi daerah, hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber daya nasional yang berada didaerah, hak mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber pendapatan lain yang berada pada daerah tersebut. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD keuangan daerah, laporan keuangan harus mampu menyajikan informasi yang berkualitas mengingat peranannya dalam pengambilan keputusan untuk tiap daerah. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan pemerintah yang harus disajikan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Operasional. Telah diketahui bahwa banyaknya pihak yang mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

### **Kualitas Laporan Keuangan**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila laporan tersebut (1) andal, (2) relevan, (3) dapat dipahami, dan (4) dapat dibandingkan. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Daerah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh para pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu (Roviyantie, 2011). Kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh pada akuntabilitas, dengan kualitas laporan keuangan yang baik akan memberikan dedikasi terhadap akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dibuat. Alat untuk memfasilitasi agar laporan keuangan tersebut semakin transparan dan akuntabel yaitu dengan SAP. Dengan menerapkan SAP informasi keuangan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas. SAP mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Kualitas laporan keuangan adalah penyajian laporan keuangan yang memiliki kriteria antara lain: kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern (Yuliani, 2010).

Tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan, alat akuntabilitas publik, dan untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi. LKPD diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik untuk keputusan ekonomi sosial dan politik (Arsyati, 2008).

### **Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan suatu organisasi. Untuk memberi kontribusi yang optimal perlu upaya pencapaian dalam tujuan organisasi. Menurut Arfianti (2011) bahwa Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama dan penggerak roda organisasi dalam mewujudkan visi dan misi suatu organisasi. Dalam pengelolaan keuangan, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas yang didukung oleh latar belakang pendidikan akuntansi, pengalaman kerja di bidang keuangan dan mengikuti pelatihan kerja. Kualitas sumber daya manusia adalah suatu kesatuan tenaga manusia sebagai suatu sistem di mana tiap-tiap karyawan berfungsi untuk mencapai tujuan informasi serta diukur berdasarkan latar belakang pendidikan yang diperoleh pegawai (Rumenser, 2014). Arfianti (2011) menyatakan sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Apabila disuatu pemerintahan terdapat sumber daya manusia yang berkualitas tentu akan menjadikan daerah tersebut menjadi daerah yang makmur, karena bagi perekonomian negara, kesuksesan suatu pemerintahan akan menjadikan perekonomian suatu negara lebih baik. Menurut Arsyati (2008) kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan maupun ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan. Sumber daya manusia yang cakap, mampu dan terampil belum mampu menjamin produktivitas kerja yang baik apabila moral dan kedisiplinannya rendah. Baik buruknya kinerja seorang lulusan lembaga pendidikan akan tergantung dari tingkat pemahaman materi pembelajaran yang dapat/telah diserap, dan penerapan serta pengembangannya oleh pribadi yang bersangkutan dilingkungan kerjanya.

### **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Menurut Mulyadi (2001) sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian, dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Menurut Winarno (2006: 11) menyatakan bahwa untuk mengurangi ancaman dan risiko terhadap sistem informasi akuntansi, diperlakukan suatu sistem pengendalian intern yang dirancang dan dijalankan dengan baik. Tanpa sistem pengendalian intern, sistem akan mudah dirusak atau mudah digunakan orang lain yang tidak berhak. Untuk menangani masalah kecurangan akuntansi, diperlukan monitoring, untuk mendapatkan hasil monitoring yang baik, diperlukan pengendalian internal yang efektif (Wilopo, 2006). Menurut Krismiaji (2010: 218) menyatakan bahwa rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga dan melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen.

Menurut COSO (2013), sistem pengendalian intern memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) Sistem pengendalian intern merupakan sebuah proses, sehingga tidak pernah berhenti bekerja; (2) Sangat dipengaruhi oleh orang dari berbagai tingkatan manajemen di dalam perusahaan; (3) Hanya dapat memberikan perlindungan secara *reasonable* (sewajarnya), karena harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian (*cost and benefit*); (4) Ditujukan untuk melindungi tujuan perusahaan secara keseluruhan, tidak hanya terhadap laporan

keuangan saja; (5) Memiliki berbagai komponen yang berbeda-beda fungsinya namun saling terkait. Di Indonesia sendiri perkembangan pengendalian internal khususnya pada entitas pemerintah ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Dalam PP SPIP, sistem pengendalian intern didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan SPIP sendiri adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengendalian merupakan suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan manajemen untuk memastikan (secara memadai, bukan mutlak) tercapainya tujuan dan sasaran organisasi. Menurut Kusumastuti (2012), sasaran pengendalian internal adalah: 1) Mendukung operasi perusahaan yang efektif dan efisien; 2) Laporan Keuangan yang handal/akuntabel; 3) Perlindungan aset; 4) Mengecek keakuratan dan kehandalan data akuntansi; 5) Kesesuaian dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku; 6) Membantu menentukan kebijakan manajerial.

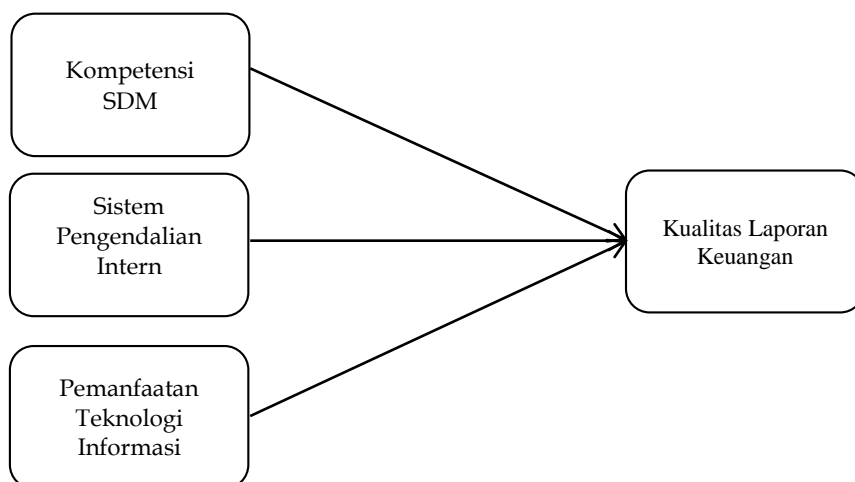
### **Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya (Yuliani, 2010). Nasir dan Oktari (2013) teknologi merupakan suatu jaringan komputer yang terdiri dari berbagai komponen pemrosesan informasi yang menggunakan berbagai jenis *hardware*, *software*, manajemen data dan teknologi jaringan informasi. Pemanfaatan teknologi informasi digunakan oleh pemerintah dalam membantu pegawai pemerintah dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Di dalam PP No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah diungkapkan bahwa penyampaian informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 dilakukan secara berkala melalui dokumen tertulis maupun media lainnya. Dengan adanya teknologi, pemerintah dapat dimudahkan dalam menyalurkan informasi yang didapat kepada masyarakat maupun informasi keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Pemanfaatan teknologi yang semakin canggih harus didukung oleh keahlian individu dalam mengoperasikannya sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja pegawai pemerintah dan dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi jika didesain menjadi sistem informasi yang efektif. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan peranan penting dalam menjalankan sistem informasi sehingga peranannya yang memadai harus didukung seperti tersedianya perangkat komputer baik hardware maupun software yang mampu menghasilkan informasi, berupa laporan keuangan yang berkualitas dengan penerapan standar khusus. Jika ditinjau dari total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah (APBN atau APBD) dari tahun ketahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Untuk itu pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang telah diatur menurut PP Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan untuk meningkatkan kemajuan keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

### **Model Penelitian**

Rerangka pemikiran yang dimaksudkan merupakan konsep untuk mengungkapkan hubungan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah. Terdapat dua macam hubungan keagenan menurut *agency theory* yaitu hubungan

keagenan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat (*principal*) tidak memiliki cukup banyak pengetahuan akan pelaksanaan pemerintah, maka diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan laporan keuangan. Untuk menunjang kualitas laporan keuangan memerlukan aspek lain yang dapat memengaruhi antar lain kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi. Berikut gambar rerangka konseptual, yang nampak pada Gambar 1.



**Gambar 1**  
Model Penelitian

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Kompetensi sumber daya manusia penting dalam mengelola dan menyajikan informasi keuangan sehingga laporan keuangan yang disusun dapat tepat waktu. Selain sumber daya manusia yang kompeten, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan juga memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Arfianti (2011) bahwa Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama dan penggerak roda organisasi dalam mewujudkan visi dan misi suatu organisasi. Dalam pengelolaan keuangan, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas yang didukung oleh latar belakang pendidikan akuntansi, pengalaman kerja di bidang keuangan dan mengikuti pelatihan kerja. Sumber daya manusia merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kesiapan dan efektifitas implementasi sistem akuntansi keuangan daerah di lingkungan pemerintah. Kompetensi sumber daya manusia yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas akan meningkatkan kandungan nilai informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah RI nomor 71 tahun 2010 mengatakan mudah dipahami merupakan salah satu indikator berkualitasnya LKPD, hal ini berkaitan erat dengan SDM yang menghasilkannya. Kualitas sumber daya manusia adalah suatu kesatuan tenaga manusia sebagai suatu sistem di mana tiap-tiap karyawan berfungsi untuk mencapai tujuan informasi serta diukur berdasarkan latar belakang pendidikan yang diperoleh pegawai (Rumenser, 2014). Pujanira (2017), dalam penelitiannya mengemukakan bahwa dengan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang sesuai dengan pemahaman sistem akuntansi yang baik maka akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan ketepatan waktu dalam pembuatannya hasil ini didukung oleh penelitian Nugroho (2018). Berdasarkan uraian di atas dan penelitian terdahulu maka dapat diusulkan sebuah hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah



## **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Salah satu hal yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah dengan adanya sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern dapat terdiri atas kebijakan dan prosedur yang nantinya dapat diterapkan untuk mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan laporan keuangan yang handal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Krismiaji (2010:218) menyatakan bahwa rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga dan melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. Pemerintah telah menggariskan bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), setidaknya ada dua tugas penting yang diamanatkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yaitu (1) melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah, dan (2) melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan sistem pengendalian intern. Selain itu, dengan mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang merupakan suatu sistem pengendalian intern yang akan diselenggarakan secara menyeluruh pada lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP Nomor 60 Tahun 2008). SPIP yang merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya manusia pada suatu organisasi yang turut berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan secara dini. Nugroho (2018), dalam penelitiannya mengemukakan bahwa pengendalian intern yang diberlakukan sesuai dengan peraturan maka dapat memberikan suatu keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang dapat digambarkan dengan kualitas laporan keuangan yang baik hasil ini didukung oleh penelitian Surastiani dan Handayani (2015). Berdasarkan uraian di atas dan penelitian terdahulu maka dapat diusulkan sebuah hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

## **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan peranan penting dalam menjalankan sistem informasi sehingga peranannya yang memadai harus didukung seperti tersedianya perangkat komputer baik *hardware* maupun *software* yang mampu menghasilkan informasi, berupa laporan keuangan yang berkualitas dengan penerapan standar khusus. Jika ditinjau dari total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah (APBN atau APBD) dari tahun ketahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Untuk itu pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang telah diatur menurut PP Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan untuk meningkatkan kemajuan keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengelolaan data transaksi keuangan, penyajian laporan keuangan, serta dapat menghindari kesalahan dalam melakukan posting dari dokumen buku, jurnal, buku besar, hingga menjadi kesatuan laporan keuangan yang utuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Persiapan penggunaan teknologi informasi terkadang membuat pekerjaan efektif dan efisien tetapi akan mengakibatkan berkurangnya pekerjaan suatu organisasi, disamping itu penggunaan teknologi informasi membutuhkan dana yang cukup mahal. Nasir dan Oktari (2013) teknologi merupakan suatu jaringan komputer yang terdiri dari berbagai komponen pemrosesan

informasi yang menggunakan berbagai jenis *hardware*, *software*, manajemen data dan teknologi jaringan informasi. Pemanfaatan teknologi informasi digunakan oleh pemerintah dalam membantu pegawai pemerintah dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Setyowati *et al.*, (2016), dalam penelitiannya mengemukakan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan pemerintah daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada layanan publik, hasil ini didukung oleh penelitian Putri (2017). Berdasarkan uraian di atas dan penelitian terdahulu maka dapat diusulkan sebuah hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (objek) Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif yang merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik. Menurut Sugiyono, (2016:135) populasi dalam penelitian kuantitatif adalah wilayah generalisasi yang didalamnya terdapat objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Surabaya.

### Tektik Pengambilan Sampel

Sampel dalam penelitian kuantitatif merupakan bagian dari populasi yang mempunyai kekhususan atau ciri khas tertentu (Sugiyono, 2016:136). Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yang berarti pengambilan sampel berasal dari sumber yang berdasarkan pertimbangan tertentu yang ditentukan oleh penulis. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu agar dapat mendukung penelitian ini. Penelitian ini, peneliti menetapkan sampel penelitian sebanyak 22 Dinas dan 4 Badan di OPD di Kota Surabaya. Dalam penelitian ini kriteria sampel yang digunakan adalah: (1) Pejabat penatausahaan keuangan daerah (PPKD) pada masing-masing Dinas pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Surabaya; (2) Memiliki masa kerja minimal satu tahun dalam periode penyusunan laporan keuangan. Pemilihan kriteria sampel ini didasarkan pada alasan bahwa satuan kepala dinas yang bertugas dibagian akuntansi/penatausahaan keuangan merupakan pihak yang secara langsung terlibat dalam proses pencatatan transaksi keuangan pada OPD dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

### Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data subjek. Data subjek merupakan jenis data penelitian berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian atau responden. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden yang menjadi sasaran yaitu pejabat penatausahaan keuangan Organisasi Pemerintah Daerah dan pejabat penatausahaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Surabaya. Untuk sumber data, peneliti menggunakan instrumen yang telah dikembangkan oleh peneliti terdahulu seperti (1) Kompetensi sumber daya manusia yang merujuk pada Pujanira (2017); (2) Sistem pengendalian intern pemerintah merujuk pada Nugroho (2018); (3) Pemanfaatan teknologi informasi merujuk pada Nugroho (2018); (4) Kualitas laporan keuangan merujuk pada Sudiarianti (2016). Teknik pengumpulan data

menggunakan kuesioner yang akan di antar langsung oleh penulis kepada kepala dinas bagian akuntansi atau penatausahaan keuangan pada OPD kota Surabaya.

### **Variabel dan Definisi Oprasional Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)**

Kompetensi Sumber daya manusia merupakan kemampuan individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk menjalankan tugas dan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Variabel kompetensi sumber daya manusia dapat diukur dengan indikator yang dikembangkan oleh Pujanira (2017) yaitu: (1) Pengetahuan (*knowledge*); (2) Keterampilan (*skill*); (3) Sikap (*attitude*)

### **Sistem Pengendalian Intern (SPI)**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan suatu sistem pengendalian intern yang akan diselenggarakan secara menyeluruh pada lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP Nomor 60 Tahun 2008). Variabel sistem pengendalian intern dapat diukur dengan indikator yang dikembangkan oleh Nugroho (2018) yaitu: (1) Sistem akuntansi keuangan; (2) Sistem akuntansi aset tetap; (3) Sistem akuntansi biaya; (4) Laporan keuangan telah *direview*; (5) Pelaporan setiap transaksi yang terjadi harus didukung dengan bukti transaksi yang sah; (6) Serta adanya pemisahan tugas dalam rangka pelaksanaan anggaran.

### **Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)**

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan peranan penting dalam menjalankan sistem informasi sehingga peranannya yang memadai harus didukung seperti tersedianya perangkat komputer baik *hardware* maupun *software* yang mampu menghasilkan informasi, berupa laporan keuangan yang berkualitas dengan penerapan standar khusus. Variabel pemanfaatan teknologi informasi dapat diukur dengan indikator yang dikembangkan oleh Nugroho (2018) yaitu: (1) Tersedianya komputer dalam jumlah yang cukup untuk melaksanakan tugas; (2) Terpasangnya jaringan internet sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan; (3) Pelaksanaan proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi; (4) Pelaksanaan dalam pengolahan data transaksi keuangan menggunakan *software* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (5) Serta ketrampilan mengoperasikan komputer dalam melaksanakan proses akuntansi.

### **Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLK)**

Kualitas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang disajikan dapat dipahami, dan menyediakan informasi sesuai dengan kebutuhan pemakai dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, bebas dari kesalahan material, dapat diandalkan, sehingga dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Indikator kualitas laporan keuangan diperoleh dari Sudiarianti (2016) yaitu: (1) Relevan (2) Andal (3) Dapat dibandingkan (4) Dapat dipahami.

### **Teknik Analisis Data**

#### **Uji Validitas**

Uji validitas berfungsi untuk mengukur valid atau tidaknya suatu koesioner. Koesioner dapat dikatakan *valid* apabila pertanyaan-pertanyaan yang terdapat didalam koesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Dengan menggunakan uji Validitas maka, dapat membuktikan apakah pertanyaan-pertannya yang dusajikan dalam koesioner sudah mampu mengungkapkan masalah yang diteliti. Uji signifikandilakukan dengan meembandingkan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel untuk *degree of freedom* ( $df$ ) =  $n - 2$  dan  $n$  adalah

jumlah sampel. Jika  $r$  hitung  $> r$  tabel dan bernilai positif maka intem-intem pertanyaan dalam koesioner tersebut dikatakan *valid* (Ghozali, 2016:53).

### Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan suatu indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reabel atau handal apabila jawaban seseorang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronboach Alpha*  $> 0,60$  (Ghozali, 2016:48).

### Uji Asumsi Klasik

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik adalah model regresi yang seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal atau nilai korelasi sesama variabel tidak sama dengan nol (Ghozali, 2016:103). Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya multikolonieritas didalam model regresi adalah dengan nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *cutoff* yang digunakan untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *Tolerance*  $\leq 0.10$  atau sama dengan nilai  $VIF \geq 10$  (Ghozali, 2016:104). Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang mempunyai distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2016). Untuk mengetahui data terdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan menggunakan 2 pendekatan yaitu: (1) Pendekatan grafik dengan melihat sebaran titik-titik mengikuti arahgaris diagonal; (2) Pendekatan *kolmogorov sminor* dengan melihat garis probabilitas  $> 0,05$ . Uji Heteroskedastisitas adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamat ke pengamat yang lain. Jika variance dari residual satu pengamat ke pengamamat yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan sebaliknya apabila variace dari residual satu pengamat ke pengamat yang lain berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat Heteroskedastisitas. Untuk mendekteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terkait yaitu ZEPRED dengan residualnya SRESID dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X merupakan residual ( $Y$  prediksi -  $Y$  sesungguhnya) yang telah di-studentized. Dasar analisis untuk uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut: (1) Jika ada pola tertentu Seperti titi-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengidikasikan telah terjadi heteroskedastisitas; (2) Jika ada pola jelas, serta titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Setelah mengumpulkan data, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda (Ghozali, 2016). Dalam penelitian ini model regresi berganda yang digunakan adalah:

$$KLK = \alpha + \beta_1 SDM + \beta_2 SPI + \beta_3 PTI + \epsilon$$

Keterangan :

|                 |  |
|-----------------|--|
| $\alpha$        | : konstanta  |
| $\beta_{1,2,3}$ | : beta atau koefisien regresi dari variabel dependen |
| KLK             | : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah               |
| SDM             | : Kompetensi Sumber Daya Manusia                     |

- SPI : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- PTI : Pemanfaatan Teknologi Informasi
- € : Kesalahan residual

**Koefisien Determinasi Berganda (Uji R<sup>2</sup>)**

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:95). Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu ( $0 < R^2 < 1$ ) jika nilai R<sup>2</sup> yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel sangat terbatas, tetapi jika nilai R<sup>2</sup> mendekati satu berarti variabel-variabel dependen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan (Ghozali, 2016:95).

**Uji Kelayakan Model (Uji F)**

Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model yang dihasilkan dengan menggunakan uji kelayakan model pada tingkat  $\alpha$  sebesar 5% pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria pengujiannya adalah: (1) jika nilai signifikan uji F > 0,05, maka model yang digunakan dalam penelitian tidak layak dan tidak dapat dipergunakan analisis berikutnya; (2) Jika nilai signifikan uji F < 0,05, maka model yang digunakan dalam penelitian layak dan dapat dipergunakan analisis berikutnya.

**Uji Hipotesis (uji t)**

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:97). Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H<sub>0</sub>: Variabel-variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen

H<sub>a</sub>: Variabel-variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen

Tingkat kepercayaan 95% atau taraf signifikan 5% dengan kriteria sebagai berikut:

1. Apabila nilai probabilitas signifikansi < 0,05, maka H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak.
2. Apabila nilai probabilitas signifikansi > 0,05, maka H<sub>0</sub> ditolak H<sub>a</sub> diterima.

**ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

**Uji Validitas**

Sah atau *valid* tidaknya suatu kuesioner dapat diukur dengan Uji validitas. Berikut hasil pengujian validitas yang disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Validitas**

| Variabel                             | Indikator         | r hitung | r tabel | Keterangan |
|--------------------------------------|-------------------|----------|---------|------------|
| Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) | SDM <sub>1</sub>  | 0,645    | 0,227   | Valid      |
|                                      | SDM <sub>2</sub>  | 0,718    | 0,227   | Valid      |
|                                      | SDM <sub>3</sub>  | 0,251    | 0,227   | Valid      |
|                                      | SDM <sub>4</sub>  | 0,280    | 0,227   | Valid      |
|                                      | SDM <sub>5</sub>  | 0,268    | 0,227   | Valid      |
|                                      | SDM <sub>6</sub>  | 0,328    | 0,227   | Valid      |
|                                      | SDM <sub>7</sub>  | 0,253    | 0,227   | Valid      |
|                                      | SDM <sub>8</sub>  | 0,249    | 0,227   | Valid      |
|                                      | SDM <sub>9</sub>  | 0,645    | 0,227   | Valid      |
|                                      | SDM <sub>10</sub> | 0,718    | 0,227   | Valid      |
|                                      | SDM <sub>11</sub> | 0,237    | 0,227   | Valid      |
|                                      | SPI <sub>1</sub>  | 0,436    | 0,227   | Valid      |

|   |                                       |                  |       |       |
|---|---------------------------------------|------------------|-------|-------|
| Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI)       | SPI <sub>2</sub>                      | 0,594            | 0,227 | Valid |
|   | SPI <sub>3</sub>                      | 0,711            | 0,227 | Valid |
|   | SPI <sub>4</sub>                      | 0,711            | 0,227 | Valid |
|   | SPI <sub>5</sub>                      | 0,361            | 0,227 | Valid |
|   | SPI <sub>6</sub>                      | 0,594            | 0,227 | Valid |
|   | Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) | PTI <sub>1</sub> | 0,440 | 0,227 |
| PTI <sub>2</sub>                                  |                                       | 0,545            | 0,227 | Valid |
| PTI <sub>3</sub>                                  |                                       | 0,518            | 0,227 | Valid |
| PTI <sub>4</sub>                                  |                                       | 0,490            | 0,227 | Valid |
| PTI <sub>5</sub>                                  |                                       | 0,539            | 0,227 | Valid |
| Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLK) | KLK <sub>1</sub>                      | 0,256            | 0,227 | Valid |
|   | KLK <sub>2</sub>                      | 0,228            | 0,227 | Valid |
|   | KLK <sub>3</sub>                      | 0,774            | 0,227 | Valid |
|   | KLK <sub>4</sub>                      | 0,774            | 0,227 | Valid |
|   | KLK <sub>5</sub>                      | 0,538            | 0,227 | Valid |
|   | KLK <sub>6</sub>                      | 0,228            | 0,227 | Valid |
|   | KLK <sub>7</sub>                      | 0,353            | 0,227 | Valid |
|   | KLK <sub>8</sub>                      | 0,774            | 0,227 | Valid |
|   | KLK <sub>9</sub>                      | 0,353            | 0,227 | Valid |
|   | KLK <sub>10</sub>                     | 0,774            | 0,227 | Valid |
|   | KLK <sub>11</sub>                     | 0,275            | 0,227 | Valid |
|   | KLK <sub>12</sub>                     | 0,323            | 0,227 | Valid |
|   | KLK <sub>13</sub>                     | 0,353            | 0,227 | Valid |
|   | KLK <sub>14</sub>                     | 0,302            | 0,227 | Valid |
|   | KLK <sub>15</sub>                     | 0,538            | 0,227 | Valid |

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa semua butir pertanyaan yang mengukur variabel penerapan prinsip pengelolaan keuangan, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah *valid* dengan nilai semua  $r$  hitung disetiap variabel tersebut lebih besar dari  $r$  tabel. Hasil  $r$  hitung tersebut menunjukkan bahwa setiap butir pertanyaan dalam masing-masing variabel mampu mengungkapkan tujuan dalam penelitian ini.

### Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas dengan nilai *Cronbach's Alpha* dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2  
Hasil Uji Reliabilitas

| Variabel  | <i>Cronbach's Alpha</i> | Koefisien Alpha | Ket             |
|---|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)              | 0,667                   | 0,60            | <i>Reliable</i> |
| Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI)       | 0,720                   | 0,60            | <i>Reliable</i> |
| Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)             | 0,665                   | 0,60            | <i>Reliable</i> |
| Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLK) | 0,705                   | 0,60            | <i>Reliable</i> |

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan pada Tabel 2 menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* masing-masing variabel sudah reliabel, karena nilai *Cronbach's Alpha* masing-masing variabel  $> 0,60$ , sehingga dapat dikatakan reliabel yang artinya jawaban responden dalam penelitian ini stabil.

### Uji Multikolinearitas

Berikut adalah hasil pengujian multikolinearitas, yang nampak pada Tabel 3.

**Tabel 3**  
**Hasil Pengujian Multikolinearitas**

| Variabel                                    | Tolerance | VIF   |
|---|-----------|-------|
| Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)        | 0,533     | 1,875 |
| Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI) | 0,515     | 1,941 |
| Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)       | 0,826     | 1,210 |

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan pada Tabel 3, dapat diketahui bahwa nilai VIF dari variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi menunjukan nilai lebih dari 1 dan kurang dari 10 dan nilai *tolerance* kurang dari 1, sehingga dapat disimpulkan bahawa dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas (tidak terjadi kolerasi antara variabel independen).

**Uji Normalitas**

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* dilakukan agar pengujian normalitas tidak bias, dengan syarat apabila nilai signifikansi diatas 0,05 maka data residual terdistribusi normal. Berikut adalah hasil pengujian *Kolmogorov-Smirnov*, yang nampak pada Tabel 4.

**Tabel 4**  
**Hasil uji Kolmogorov-Smirnov**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

|                                |                | Unstandardized Residual |
|--------------------------------|----------------|-------------------------|
| N                              |                | 78                      |
| Normal Parameters <sup>a</sup> | Mean           | .0000000                |
|                                | Std. Deviation | 1.84944491              |
| Most Extreme Differences       | Absolute       | .132                    |
|                                | Positive       | .078                    |
|                                | Negative       | -.132                   |
| Kolmogorov-Smirnov Z           |                | 1.164                   |
| Asymp. Sig. (2-tailed)         |                | .133                    |

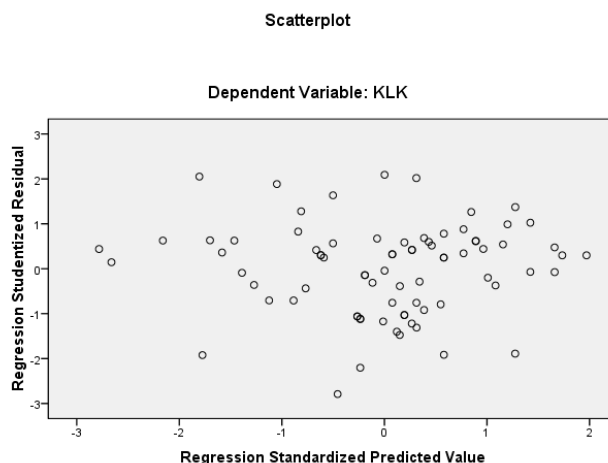
a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* pada Tabel 4, maka dapat disimpulkan data yang diuji dengan metode *Kolmogorov-Smirnov* berdistribusi normal karena memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,133 > 0,05$ .

**Uji Heteroskedastisitas**

Berikut adalah hasil pengujian heteroskedastisitas yang nampak pada Gambar 2.



**Gambar 2**  
**Uji Heteroskedastisitas**  
 Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan Gambar 2, maka dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berikut adalah hasil Analisis regresi linear berganda yang nampak pada Tabel 5.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

| <i>Coefficients<sup>a</sup></i> |                                    |            |      |                     |       |      |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------|---------------------|-------|------|
| Model                           | <i>Unstandardized Coefficients</i> |            |      | <i>Standardized</i> | t     | Sig. |
|                                 | B                                  | Std. Error | Beta | Coefficients        |       |      |
| 1 (Constant)                    | 6.983                              | 4.090      |      |                     | 1.708 | .092 |
| SDM                             | .820                               | .107       | .485 |                     | 7.639 | .000 |
| SPI                             | .818                               | .126       | .420 |                     | 6.507 | .000 |
| PTI                             | .504                               | .144       | .179 |                     | 3.512 | .001 |

a. Dependent Variable: KLK  
 Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan data pada Tabel 5, maka didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$KLK = 6,983 + 0,820 \text{ SDM} + 0,818 \text{ SPI} + 0,504 \text{ PTI} + e$$

Persamaan regresi yang dihasilkan menunjukkan variabel kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki koefisien yang bertanda positif yang berarti ketiga variabel tersebut akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.



### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang nampak pada Tabel 6.

**Tabel 6**  
**Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

| Model Summary <sup>b</sup> |                   |          |                   |                            |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model                      | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1                          | .841 <sup>a</sup> | .707     | .685              | 1.88656                    |

a. Predictors: (Constant), PTI, SDM, SPI

b. Dependent Variable: KLK

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil pada Tabel 6, menunjukan nilai  $R^2$  sebesar 0,707 yang berarti kontribusi pengaruh yang diberikan variabel independen seperti kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap variabel dependen kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 70,7% dan sisanya adalah sebesar 29,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam model. Nilai  $R^2$  mendekati angka 1 menunjukkan variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

### Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model yang dihasilkan dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ( $\alpha=5\%$ ). Sehingga dapat dilihat apakah model masuk didalam kategori atau tidak. Berikut adalah hasil uji F yang nampak pada Tabel 7.

**Tabel 7**  
**Uji Kelayakan Model**

| ANOVA <sup>b</sup> |            |                |    |             |         |                   |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|---------|-------------------|
| Model              |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F       | Sig.              |
| 1                  | Regression | 1394.164       | 3  | 464.721     | 130.572 | .000 <sup>a</sup> |
|                    | Residual   | 263.374        | 74 | 3.559       |         |                   |
|                    | Total      | 1657.538       | 77 |             |         |                   |

a. Predictors: (Constant), PTI, SDM, SPI

b. Dependent Variable: KLK

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil pada Tabel 7, dapat dilihat nilai tingkat signifikan uji kelayakan model sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini cocok atau *fit*.

### Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t dilakukan untuk menguji hipotesis yaitu pengaruh variabel independen dengan variabel lain yang dianggap konstan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0,05 = ( $\alpha 5\%$ ). Berikut hasil uji hipotesis yang nampak pada Tabel 8.

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Hipotesis (Uji t)**  
*Coefficients<sup>a</sup>*

| Model        | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|              | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1 (Constant) | 6.983                       | 4.090      |                           | 1.708 | .092 |
| SDM          | .820                        | .107       | .485                      | 7.639 | .000 |
| SPI          | .818                        | .126       | .420                      | 6.507 | .000 |
| PTI          | .504                        | .144       | .179                      | 3.512 | .001 |

a. *Dependent Variable*: KLIK

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis yang dilakukan dalam penelitian berikut adalah pembahasannya:

H<sub>1</sub>: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 < 0,05 dan hipotesis pertama (H<sub>1</sub>) diterima.

H<sub>2</sub>: Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini juga dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 < 0,05 dan hipotesis kedua (H<sub>2</sub>) diterima.

H<sub>3</sub>: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang juga dibuktikan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 < 0,05 dan hipotesis (H<sub>3</sub>) diterima

## Pembahasan

### Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis penelitian yang pertama menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini mengindikasikan bahwa dengan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang sesuai dengan pemahaman sistem akuntansi yang baik maka akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan ketepatan waktu dalam pembuatannya. Berdasarkan pengujian statistik menunjukkan bahwa hipotesis pertama penelitian terbukti. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rumenser (2014) dan Pujanira (2017), dengan hasil pengujiannya yang menyatakan bahwa adanya hubungan positif dan signifikan antara kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya kemampuan sumber daya manusia yang memadai maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, karena semakin berkompeten sumber daya manusianya maka semakin berkualitas pula laporan keuangan yang akan dihasilkan. Secara keseluruhan kompetensi sumber daya manusia pada Organisasi prangkat daerah (OPD) Kota Surabaya sudah efektif. Kompetensi sumber daya manusia penting dalam mengelola dan menyajikan informasi keuangan sehingga laporan keuangan yang disusun dapat tepat waktu.

Arfianti (2011) bahwa Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama dan penggerak roda organisasi dalam mewujudkan visi dan misi suatu organisasi. Dalam pengelolaan keuangan, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas yang didukung oleh latar belakang pendidikan akuntansi, pengalaman kerja di bidang keuangan dan mengikuti pelatihan kerja. Pengelolaan keuangan, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas yang didukung oleh latar belakang pendidikan akuntansi, pengalaman kerja di bidang keuangan dan mengikuti pelatihan kerja. Kualitas sumber daya

manusia adalah suatu kesatuan tenaga manusia sebagai suatu sistem di mana tiap-tiap karyawan berfungsi untuk mencapai tujuan informasi serta diukur berdasarkan latar belakang pendidikan yang diperoleh pegawai. pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Apabila disuatu pemerintahan terdapat sumber daya manusia yang berkualitas tentu akan menjadikan daerah tersebut menjadi daerah yang makmur, karena bagi perekonomian negara, kesuksesan suatu pemerintahan akan menjadikan perekonomian suatu negara lebih baik

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hipotesis penelitian yang kedua menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini mengindikasikan bahwa pengendalian intern yang diberlakukan sesuai dengan peraturan maka dapat memberikan suatu keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang dapat digambarkan dengan kualitas laporan keuangan yang baik. Berdasarkan pengujian statistik menunjukkan bahwa hipotesis kedua penelitian terbukti. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Surastiani dan Handayani (2015) dan Nugroho (2018), dengan hasil pengujiannya yang menyatakan bahwa adanya hubungan positif dan signifikan antara sistem pengendalian intern pemerintah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Salah satu hal yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah dengan adanya sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern dapat terdiri atas kebijakan dan prosedur yang nantinya dapat diterapkan untuk mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan laporan keuangan yang handal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Winarno (2006:11) menyatakan bahwa untuk mengurangi ancaman dan risiko terhadap sistem informasi akuntansi, diperlakukan suatu sistem pengendalian intern yang dirancang dan dijalankan dengan baik. Tanpa sistem pengendalian intern, sistem akan mudah dirusak atau mudah digunakan orang lain yang tidak berhak. Untuk menangani masalah kecurangan akuntansi, diperlukan monitoring, untuk mendapatkan hasil monitoring yang baik, diperlukan pengendalian internal yang efektif (Wilopo, 2006). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan suatu sistem pengendalian intern yang akan diselenggarakan secara menyeluruh pada lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP Nomor 60 Tahun 2008). SPIP yang merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya manusia pada suatu organisasi yang turut berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan secara dini. Krismiaji (2010:218) menyatakan bahwa rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga dan melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen

### **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hipotesis penelitian yang ketiga menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini mengindikasikan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan pemerintah daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada layanan publik. Berdasarkan pengujian statistik menunjukkan bahwa hipotesis ketiga penelitian terbukti. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017), dengan hasil pengujiannya yang

menyatakan bahwa adanya hubungan positif dan signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan peranan penting dalam menjalankan sistem informasi sehingga peranannya yang memadai harus didukung seperti tersedianya perangkat komputer baik *hardware* maupun *software* yang mampu menghasilkan informasi, berupa laporan keuangan yang berkualitas dengan penerapan standar khusus. Jika ditinjau dari total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) dari tahun ketahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Untuk itu pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang telah diatur menurut PP Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan untuk meningkatkan kemajuan keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Pemanfaatan teknologi informasi digunakan oleh pemerintah dalam membantu pegawai pemerintah dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Nasir dan Oktari (2013) teknologi merupakan suatu jaringan komputer yang terdiri dari berbagai komponen pemrosesan informasi yang menggunakan berbagai jenis *hardware*, *software*, manajemen data dan teknologi jaringan informasi. Pemanfaatan teknologi informasi digunakan oleh pemerintah dalam membantu pegawai pemerintah dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Didalam PP No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah diungkapkan bahwa penyampaian informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 dilakukan secara berkala melalui dokumen tertulis maupun media lainnya. Dengan adanya teknologi, pemerintah dapat dimudahkan dalam menyalurkan informasi yang didapat kepada masyarakat maupun informasi keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Pemanfaatan teknologi yang semakin canggih harus didukung oleh keahlian individu dalam mengoperasikannya sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja pegawai pemerintah dan dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi jika didesain menjadi sistem informasi yang efektif.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama menunjukkan variabel kompetensi sumber daya manusia mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang sesuai dengan pemahaman sistem akuntansi yang baik maka akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan ketepatan waktu dalam pembuatannya; (2) Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua menunjukkan variabel Sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem pengendalian intern pemerintah memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian intern yang diberlakukan sesuai dengan peraturan maka dapat memberikan suatu keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang dapat digambarkan dengan kualitas laporan keuangan yang baik; (3) Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan variabel pemanfaatan teknologi informasi mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,001 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan

kemampuan mengelola keuangan pemerintah daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada layanan publik

### Saran

Adapun keterbatasan penelitian ini, sebagai berikut: (1) Objek dalam penelitian ini hanya berkisar pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya yang sebenarnya bisa di perluas di tingkat provinsi; (2) Karena memiliki banyak kesibukan dan terbatasnya waktu, responden meminta kuesionernya ditinggalkan yang berdampak pada peneliti tidak bisa mendampingi responden pada saat menjawab. Akibatnya jawaban yang diberikan belum tentu menggambarkan keadaan yang sebenarnya; (3) Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi. Sedangkan saran yang diberikan sebagai berikut: (1) Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian dengan ruang lingkup provinsi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, seperti sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Badan, kecamatan dan kelurahan yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan generalisasi untuk memperlihatkan kualitas laporan keuangan daerah menjadi kuat; (2) Bagi peneliti selanjutnya agar mendampingi responden saat menjawab kuesioner dan melakukan wawancara untuk meningkatkan pemahaman terhadap jawaban responden tersebut; (3) Bagi peneliti selanjutnya peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel-variabel lain yang masih mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah misalnya penerapan standar akuntansi pemerintah, pengawasan keuangan daerah dan penerapan perinsip pengelolaan keuangan daerah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arfianti, D. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Arsyati. 2008. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Keuangan terhadap Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan PNBPN dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Instansi. *Thesis*. Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.
- Carr, J. B. dan S. R. Brower. 2000. Principled opportunism: Evidence from the Organizational Middle. *Public Administration Quarterly* (Spring): 109-138.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). 2013. *Internal Control - Integrated Framework*. AIGPA's Publication Division. New York.
- Faristina, R. 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan dan timeliness pelaporan keuangan badan layanan umum (Studi pada Badan Layanan Umum di Kota Semarang). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi Kedelapan. BP Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ihsanti, H. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (studi empiris pada SKPD kab. Lima Puluh Kota). *Skripsi*. Universitas Negeri Padang. Padang.
- Jensen, M dan W. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. 3: 305-360
- Krismiaji. 2010. *Sistem Informasi Akuntansi*. UPP. AMP YKPN. Yogyakarta
- Kusumastuti, N. R. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dan Perilaku Tidak Etis sebagai Variabel Intervening. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Diponegoro. Semarang

- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Edisi Ketiga. Cetakan Ketiga. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Nasir, A. dan R. Oktari. 2010. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kampar). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Program Studi Akuntansi. Universitas Riau. Riau.
- Nugroho, B. S. 2018. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali). *Publikasi Ilmiah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Program Studi Akuntansi. Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 24 Tahun 2005. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. 13 juni 2005. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503*.  
 \_\_\_\_\_ . Nomor 56 tahun 2005. *Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*.  
 \_\_\_\_\_ . Nomor 58 tahun 2005. *Tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah*.  
 \_\_\_\_\_ . Nomor 60 Tahun 2008. *Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.  
 \_\_\_\_\_ . Nomor 71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.  
 \_\_\_\_\_ . Nomor 18 Tahun 2016. *Tentang Perangkat Daerah*.
- Pujanira, P. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Jurnal Nominal*. 6 (2): 14-28.
- Putri, A. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi). *Jurnal Fekon*. 4 (1): 699-713.
- Roviyantie, D. 2011. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Journal Unsil*. 1 (2):1-27.
- Rumenser, P. 2014. Pengaruh Komitmen, Kualitas Sumber Daya Manusia, Gaya Kepemimpinan Terhadap Kemampuan Penyusunan Anggaran Pada Pemerintah Kota Manado. *Artikel Ilmiah*: 40-50
- Santoso, U. dan Y. J. Pambelum. 2008. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Mencegah *Fraud*. *Jurnal Administrasi Bisnis*. 4 (1):14-33.
- Setyowati, L., W. Isthika., dan R. D. Pratiwi. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. *Kinerja*. 20 (2): 179-191.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitataif dan Kombinasi (Mixed. Methods)*. Alfabeta. Bandung.
- Surastiani, D. P. dan B. D. Handayani. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*. 7 (2): 139-149.
- Undang-Undang No. 23 tahun 2014 *tentang Pemerintah Daerah*. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahunan 2016. Jakarta
- Undang-Undang No. 32 tahun 2014 *tentang Pemerintah Daerah*
- Wilopo. 2006. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi 9*. Padang.
- Winarno, W. W. 2006. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Kedua. STIE YKPN. Yogyakarta.

- Yosefrinaldi. 2013. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Barat) 1 (1).
- Yuliani, S. 2010. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Banda Aceh). *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*. 3 (2): 206-220.